

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Achmad Ali, *“Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)”*, Jakarta: Chandra Pratama, 2002.
- Andi Hamzah, *“Korupsi di Indonesia”*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991. Dikutip dari Adami Chazawi, 1991, *“Hukum Pidana Korupsi di Indonesia”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin, *“Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi KeArah Ragam Varian Kontemporer”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chaerudin dkk, *“Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Diantha Pasek Made I, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum Cetakan Ke-1*, Jakarta : Prenada Media Group, 2016.
- Ermansyah Djaja, *“Memberantas Korupsi Bersama KPK”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- E. Sumaryono, *“Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)”*, Yogyakarta : Kanisius, 2000.
- Hamzah Andi, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, *“Kamus Pintar Bahasa Indonesia”*, Surabaya: Fajar Mulia, 1996.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- HLM. Jawade Hafidz Arsyad, *“Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)”*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Kartini Kartono, *“Patologi Sosial”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *“Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum”*, Surabaya:Media Grup, 2009.

- Komisi Pemberantasan Korupsi, *“Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan”*, Jakarta: KPK, 2009.
- Leden Marpaung, *“Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum”*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- _____, *“Proses Penangan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penuntutan”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki Mahmud Peter, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *“Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum”*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2010.
- _____, *“Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”*, Surabaya: Putra Tunggal, 2007.
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *“Filsafat Hukum”*, Palembang : UNSRI, 2007.
- Muhammad Junaidi, *“Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan”*, Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”*, Jakarta: Kencana Prenada Media roGup, 2010.
- Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Cet I, Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013.
- Ridwan HR, *“Hukum Administrasi Negara”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Semma, Mansyur, *“Negara dan Korupsi”*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Suhardono Edy, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- S. Wojowasito, *“Kamus Umum Belanda Indonesia”*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1999.
- Yanuar M Purwaning. *“Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia”*. Bandung: Alumni. 2007.

Jurnal, Artikel, Makalah, Internet:

Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Disampaikan pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Pebruari 2003.

Imbar Regina Maggie, “*Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*”, dimuat dalam Jurnal *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.

Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, “*Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*”, Jakarta: KHN dan MaPPI, 2004.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Materi Rapat Koordinasi Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan*, 21 November 2016, Kantor Staf Presiden, diunduh dari <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/npdf/labuksi/Rapat-Koordinasi-Tata-Laksana-Benda-Sitaan-danBarang-Rampasan-Kantor-Staf-Presiden.pdf>,

Sofwan Vidya Syifa dan Sulastris Titin, “*Peran Pusat Pemulihan Aset Di Kejaksaan Negeri Bandung*”, dimuat dalam e-journal.unibba.ac.id.

Suparni Niniek dkk, “*Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Dalam Mendorong Satker Wilayah, Untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan*”, dimuat dalam www.kejaksaan.go.id › userfiles › files › pusat_litbang.

Wedha Yasa Yogi, Darma Wirya Made I, “*Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*”, dimuat dalam Jurnal Analisis Hukum ISSN : 2620-4959 (online), 2620-3715 (print) Volume 1, No. 2, September 2018 <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>.

“*Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*”, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Prof. Dr. Hazairin S.H., Bengkulu yang berjudul, diakses dari <http://www.lppm-unihaz.ac.id/download/KTI1.php?id=2>.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/03/2014 Tanggal 20 Maret 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Pemulihan Aset (PPA).

Lain-lain:

Kejaksaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015*.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Edaran Jaksa Agung RI No.004/J.A/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010, tanggal 18 Mei 2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1017/F/Fd.1/05/2009, tanggal 20 Mei 2009 perihal Pelaksanaan Program Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010, tanggal 18 Mei 2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi